

Diseminasi Pelayanan Penyaluran Transfer ke Daerah sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Stakeholder pada KPPN Mataram

Yoel Sthyeven Wijaya
Universitas Mataram

*Email Korespodensi: yoelsthyevenwijaya05@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 28-06-2026
Disetujui 04-07-2026
Diterbitkan 06-07-2026

ABSTRACT

Transfers to Regions (TKD) are an essential fiscal instrument for supporting regional governance and promoting equitable development. Effective TKD distribution requires stakeholders to have a comprehensive understanding of the applicable regulations and distribution mechanisms. This community service activity aimed to enhance stakeholders' understanding of the TKD distribution process through the Dissemination of Regional Transfer Distribution Services conducted within a Public Consultation Forum organized by KPPN Mataram. A descriptive qualitative approach was employed using observation, documentation, and Focus Group Discussions (FGDs) as data collection techniques. The findings indicate that the forum successfully improved participants' understanding of TKD distribution procedures, identified various administrative and technical challenges encountered by local governments, and generated recommendations to strengthen inter-institutional coordination, optimize information systems, reinforce KPPN's role as a Financial Advisor, and expand dissemination activities. Overall, the program contributed to improving public service quality, strengthening stakeholder collaboration, and supporting a more effective, transparent, and accountable regional transfer distribution system.

Keywords: *Regional Transfers; Public Consultation Forum; KPPN Mataram; public service; stakeholders.*

ABSTRAK

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan instrumen fiskal yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerataan pembangunan. Keberhasilan penyaluran TKD memerlukan pemahaman yang baik dari seluruh pemangku kepentingan terhadap regulasi dan mekanisme penyalurannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman stakeholder mengenai mekanisme penyaluran TKD melalui Diseminasi Pelayanan Penyaluran Transfer ke Daerah dalam Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh KPPN Mataram. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, dokumentasi, dan diskusi kelompok (Focus Group Discussion). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa forum berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai prosedur penyaluran TKD, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah, serta menghasilkan rekomendasi perbaikan berupa penguatan koordinasi, optimalisasi sistem informasi, peningkatan fungsi KPPN sebagai *Financial Advisor*, dan perluasan kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sinergi antarstakeholder, serta mendukung penyaluran Transfer ke Daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Transfer ke Daerah; Forum Konsultasi Publik; KPPN Mataram; pelayanan publik; stakeholder.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Wijaya, Y. S. . (2026). Diseminasi Pelayanan Penyaluran Transfer ke Daerah sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Stakeholder pada KPPN Mataram. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 7472-7482. <https://doi.org/10.63822/z9nyn588>

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan keuangan negara, pelayanan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh ketepatan pelaksanaan administrasi, tetapi juga oleh kemampuan instansi pemerintah dalam membangun komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan. Salah satu bentuk komunikasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP), yaitu media dialog partisipatif yang bertujuan menghimpun masukan masyarakat, menyatukan pemahaman antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan, meningkatkan partisipasi publik, serta menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan (Kementerian PANRB, 2023).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran strategis sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dalam menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk Transfer ke Daerah (TKD). Penyaluran TKD merupakan instrumen fiskal yang bertujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kapasitas fiskal daerah melalui berbagai skema, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, dan berbagai jenis transfer lainnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Sebagai salah satu KPPN yang memiliki wilayah kerja cukup luas, KPPN Mataram bertanggung jawab menyalurkan Transfer ke Daerah kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Utara. Hingga akhir Juni 2026, wilayah kerja KPPN Mataram mengelola dana APBN sebesar Rp14,414 triliun yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp7,565 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp6,849 triliun. Besarnya nilai anggaran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyaluran dana sangat dipengaruhi oleh koordinasi, komunikasi, serta pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap mekanisme penyaluran yang berlaku. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa KPPN Mataram memiliki posisi strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah melalui fungsi penyaluran TKD.

Meskipun secara umum penyaluran TKD berjalan sesuai ketentuan, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penyaluran dana. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain keterlambatan pemenuhan persyaratan penyaluran oleh pemerintah daerah, ketidaksesuaian data dalam aplikasi OM-SPAN TKD, keterlambatan penyampaian laporan realisasi, kendala validasi antar sistem informasi, hingga masih ditemukannya retur penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Selain itu, proses penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih mengalami keterlambatan akibat belum terpenuhinya persyaratan administratif sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya memerlukan penyempurnaan regulasi, tetapi juga peningkatan pemahaman seluruh stakeholder terhadap mekanisme penyaluran dana (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026).

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, KPPN Mataram menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Pelayanan Penyaluran Transfer ke Daerah melalui Forum Konsultasi Publik Tahun 2026. Kegiatan ini diikuti oleh pemerintah daerah, satuan kerja, pemerintah desa, lembaga perbankan, organisasi profesi, media massa, serta berbagai mitra strategis lainnya. Forum tersebut menjadi media untuk menyampaikan kebijakan

terbaru mengenai penyaluran TKD, mendiskusikan berbagai kendala yang dihadapi stakeholder, sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan pelayanan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Pendekatan partisipatif seperti ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara layanan sekaligus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan (OECD, 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan diseminasi pelayanan penyaluran Transfer ke Daerah yang diselenggarakan oleh KPPN Mataram, mengidentifikasi peningkatan pemahaman stakeholder terhadap mekanisme penyaluran TKD, serta menganalisis berbagai masukan dan rekomendasi yang dihasilkan melalui Forum Konsultasi Publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengelolaan keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan kegiatan Diseminasi Pelayanan Penyaluran Transfer ke Daerah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan oleh KPPN Mataram, serta mengidentifikasi berbagai tanggapan, pengalaman, dan masukan dari para pemangku kepentingan terhadap kualitas pelayanan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara holistik berdasarkan kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2023; John W. Creswell, 2018).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sasaran kegiatan adalah para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyaluran Transfer ke Daerah, meliputi pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Mataram, satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah desa, lembaga perbankan, organisasi profesi, media massa, serta mitra strategis lainnya. Pemilihan peserta didasarkan pada keterlibatan mereka dalam pelaksanaan maupun penerimaan manfaat dari kebijakan Transfer ke Daerah sehingga diharapkan dapat memberikan masukan yang komprehensif terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi penyusunan materi sosialisasi, koordinasi dengan narasumber, identifikasi peserta, serta penyusunan agenda Forum Konsultasi Publik. Tahap pelaksanaan diawali dengan penyampaian keynote speech oleh Kepala KPPN Mataram mengenai pentingnya pelayanan publik yang partisipatif, dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai kebijakan, regulasi, mekanisme, dan proses penyaluran Transfer ke Daerah, kemudian diakhiri dengan sesi diskusi dan konsultasi yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan berbagai kendala, masukan, maupun rekomendasi terhadap pelayanan yang diberikan. Tahap evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi hasil diskusi, tanggapan peserta, serta berbagai rekomendasi perbaikan pelayanan yang diperoleh selama kegiatan berlangsung sebagai bahan peningkatan kualitas layanan pada periode berikutnya.

Subjek dalam kegiatan ini adalah para peserta Forum Konsultasi Publik yang terdiri atas pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Mataram, satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah desa, mitra perbankan, organisasi profesi, media massa, serta stakeholder lainnya yang terlibat dalam proses penyaluran

Transfer ke Daerah. Objek kajian difokuskan pada pelaksanaan diseminasi pelayanan, tingkat pemahaman stakeholder terhadap mekanisme penyaluran TKD, berbagai permasalahan yang dihadapi selama proses penyaluran, serta rekomendasi perbaikan pelayanan yang dihasilkan melalui forum diskusi.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi terhadap pelaksanaan kegiatan diseminasi, dokumentasi terhadap materi sosialisasi, regulasi, laporan kegiatan, serta hasil Forum Konsultasi Publik, dan diskusi kelompok (Focus Group Discussion/FGD) yang berlangsung selama kegiatan. Data dokumentasi meliputi profil KPPN Mataram, materi pelayanan penyaluran Transfer ke Daerah, data realisasi penyaluran TKD, identifikasi permasalahan, serta hasil diskusi yang menghasilkan berbagai rekomendasi perbaikan pelayanan. Kombinasi teknik pengumpulan data tersebut bertujuan memperoleh informasi yang komprehensif mengenai implementasi pelayanan penyaluran TKD.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi, informasi yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan diskusi dipilih sesuai fokus kegiatan. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan interpretasi terhadap proses pelaksanaan diseminasi serta berbagai tanggapan stakeholder. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara hasil observasi, dokumen kegiatan, serta rekomendasi yang muncul selama Forum Konsultasi Publik sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pemahaman stakeholder terhadap mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Diseminasi Pelayanan Penyaluran Transfer ke Daerah

Kegiatan Diseminasi Pelayanan Penyaluran Transfer ke Daerah dilaksanakan oleh KPPN Mataram melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai salah satu bentuk implementasi pelayanan publik yang mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri atas pemerintah daerah, satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah desa, lembaga perbankan, organisasi profesi, media massa, serta mitra strategis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD). Keterlibatan berbagai stakeholder tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak lagi hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pembangunan komunikasi dua arah guna memperoleh masukan sebagai dasar peningkatan kualitas layanan. Menurut Kementerian PANRB (2023), Forum Konsultasi Publik merupakan media dialog antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan melalui partisipasi aktif pengguna layanan.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan keynote speech Kepala KPPN Mataram yang menjelaskan pentingnya Forum Konsultasi Publik sebagai sarana membangun kesamaan persepsi antara penyelenggara layanan dengan pengguna layanan. Selanjutnya peserta memperoleh pemaparan mengenai proses pelayanan dan mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah, mulai dari dasar hukum, ruang lingkup TKD, mekanisme penyaluran, hingga berbagai perubahan regulasi terbaru yang menjadi pedoman pelaksanaan penyaluran dana kepada pemerintah daerah. Penyampaian materi dilakukan secara sistematis agar seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama terhadap prosedur administrasi maupun persyaratan penyaluran dana.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan mencakup berbagai jenis Transfer ke Daerah, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, serta Hibah kepada Daerah. Selain menjelaskan ruang lingkup TKD, narasumber juga memaparkan mekanisme penyaluran mulai dari penyampaian dokumen persyaratan melalui aplikasi OM-SPAN TKD, proses verifikasi oleh KPPN, penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penjelasan tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pelayanan sehingga stakeholder memahami tahapan yang harus dipenuhi dalam setiap proses penyaluran dana.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan konsultasi yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi selama proses penyaluran TKD. Forum berlangsung secara interaktif sehingga setiap peserta dapat memberikan masukan, menyampaikan pengalaman, maupun mengusulkan rekomendasi perbaikan pelayanan. Pendekatan partisipatif seperti ini sejalan dengan konsep collaborative governance yang menempatkan pemerintah dan stakeholder sebagai mitra dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pelayanan publik secara bersama-sama sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Chris Ansell & Alison Gash, 2008).

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa Forum Konsultasi Publik tidak hanya berfungsi sebagai media sosialisasi regulasi, tetapi juga menjadi wadah evaluasi pelayanan penyaluran Transfer ke Daerah. Berbagai masukan yang disampaikan peserta menjadi sumber informasi bagi KPPN Mataram untuk mengidentifikasi hambatan pelayanan sekaligus menyusun strategi perbaikan yang lebih efektif. Dengan demikian, kegiatan diseminasi mampu memperkuat hubungan antara KPPN Mataram dengan stakeholder sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Temuan ini sejalan dengan pendapat OECD (2020) yang menyatakan bahwa pelibatan stakeholder dalam proses pelayanan publik mampu meningkatkan kualitas kebijakan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Peningkatan Pemahaman Stakeholder terhadap Mekanisme Transfer ke Daerah

Salah satu tujuan utama penyelenggaraan Diseminasi Pelayanan Penyaluran Transfer ke Daerah adalah meningkatkan pemahaman stakeholder mengenai kebijakan, regulasi, serta mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Peningkatan pemahaman tersebut menjadi penting mengingat proses penyaluran TKD melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan kerja, hingga lembaga mitra yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda dalam setiap tahapan penyaluran dana. Pemahaman yang baik terhadap regulasi dan prosedur diharapkan mampu meminimalkan kesalahan administratif, mempercepat proses penyaluran, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Menurut OECD (2020), penyampaian informasi yang terbuka dan partisipatif kepada stakeholder merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik.

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh penjelasan mengenai dasar hukum terbaru yang mengatur penyaluran Transfer ke Daerah, ruang lingkup jenis-jenis TKD, mekanisme penyampaian dokumen persyaratan melalui aplikasi OM-SPAN TKD, proses verifikasi oleh KPPN, hingga tahapan penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai batas waktu penyampaian dokumen, prosedur penyelesaian retur penyaluran, mekanisme pembatalan SP2D (void), serta proses

pemantauan dan evaluasi penyaluran TKD. Penyampaian materi secara komprehensif tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keseluruhan proses penyaluran dana sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan administrasi di tingkat pemerintah daerah.

Peningkatan pemahaman stakeholder juga terlihat dari tingginya partisipasi peserta pada sesi diskusi dan konsultasi. Berbagai pertanyaan dan masukan yang disampaikan menunjukkan bahwa peserta memiliki perhatian terhadap implementasi kebijakan penyaluran TKD, terutama berkaitan dengan perubahan regulasi, mekanisme penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), pemanfaatan aplikasi OM-SPAN TKD, serta sinkronisasi sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Diskusi berlangsung secara aktif sehingga peserta tidak hanya memperoleh penjelasan dari narasumber, tetapi juga dapat berbagi pengalaman dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran dana. Pendekatan partisipatif tersebut sejalan dengan konsep pembelajaran orang dewasa (*adult learning*) yang menekankan pentingnya interaksi dan pengalaman peserta sebagai bagian dari proses peningkatan kapasitas (Knowles et al., 2020).

Hasil diskusi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan peningkatan pemahaman bersama, antara lain kebijakan penyaluran DAU yang memengaruhi perencanaan kas daerah, perbedaan subbidang pada aplikasi OM-SPAN dengan perencanaan pemerintah daerah, belum terintegrasinya beberapa sistem informasi pendukung, serta perlunya penjelasan mengenai mekanisme penyaluran Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru. Berbagai isu tersebut memperoleh penjelasan langsung dari narasumber sehingga peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dasar kebijakan maupun mekanisme penyelesaiannya. Selain itu, KPPN Mataram juga berkomitmen menyusun surat edaran dan memperluas media informasi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyaluran TKD sesuai ketentuan yang berlaku.

Forum Konsultasi Publik juga menghasilkan berbagai rekomendasi yang menunjukkan meningkatnya kesadaran stakeholder terhadap pentingnya kolaborasi dalam mendukung keberhasilan penyaluran Transfer ke Daerah. Rekomendasi tersebut meliputi perlunya percepatan penerbitan petunjuk teknis, peningkatan integrasi sistem informasi, optimalisasi fungsi KPPN sebagai *Financial Advisor*, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta perluasan kerja sama dengan media massa dalam menyebarkan informasi terkait kebijakan penyaluran TKD. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan diseminasi tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga menghasilkan masukan konstruktif yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan pelayanan publik di lingkungan KPPN Mataram.

Secara keseluruhan, kegiatan diseminasi berhasil meningkatkan pemahaman stakeholder mengenai mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah sekaligus memperkuat komunikasi antara KPPN Mataram dengan para mitra kerja. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan mampu mendukung ketepatan penyampaian dokumen persyaratan, mempercepat proses penyaluran dana, meminimalkan kendala administratif, serta mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Hasil ini memperkuat pendapat bahwa keterlibatan stakeholder melalui forum konsultasi merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus membangun kepercayaan antara pemerintah dan pengguna layanan (Kementerian PANRB, 2023).

Permasalahan dan Tantangan Penyaluran Transfer ke Daerah

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tidak hanya menjadi media penyampaian informasi mengenai kebijakan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), tetapi juga menjadi sarana untuk

mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah maupun stakeholder dalam proses penyaluran dana. Hasil diskusi menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penyaluran TKD telah mengalami berbagai penyempurnaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pembaruan regulasi, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan administratif, teknis, maupun koordinatif yang berpotensi memengaruhi ketepatan waktu penyaluran dana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi (Osborne, 2021).

Salah satu isu yang menjadi perhatian peserta forum adalah kebijakan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), khususnya terkait perubahan mekanisme penyaluran dan waktu penerbitan petunjuk teknis. Peserta menyampaikan bahwa keterlambatan terbitnya petunjuk teknis menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan kas dan menyesuaikan jadwal pemenuhan persyaratan penyaluran. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya beberapa tahapan penyaluran sehingga berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, peserta mengusulkan agar penerbitan regulasi teknis dilakukan lebih awal sehingga pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian administrasi.

Permasalahan lain yang banyak disampaikan peserta berkaitan dengan penggunaan aplikasi OM-SPAN TKD sebagai media penyampaian dokumen persyaratan penyaluran. Beberapa pemerintah daerah masih mengalami kendala berupa perbedaan klasifikasi subbidang antara sistem aplikasi dengan dokumen perencanaan daerah, sehingga mengharuskan dilakukan revisi sebelum dokumen dapat diproses lebih lanjut. Selain itu, peserta juga mengemukakan belum optimalnya integrasi antara beberapa sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga proses pelaporan dan validasi data masih memerlukan penyesuaian secara manual. Kendala tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik perlu diimbangi dengan integrasi sistem informasi yang memadai agar mampu meningkatkan efektivitas pelayanan (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020).

Dari sisi pelayanan, peserta memberikan apresiasi terhadap komitmen KPPN Mataram dalam memberikan pelayanan penyaluran TKD secara cepat, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, peserta mengharapkan adanya peningkatan intensitas sosialisasi, penyusunan surat edaran sebagai pedoman teknis, serta penguatan fungsi KPPN sebagai *Financial Advisor* bagi pemerintah daerah. Peran tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah daerah memahami perubahan regulasi, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, serta meminimalkan kesalahan administratif yang dapat menghambat proses penyaluran dana. Upaya pendampingan secara berkelanjutan juga diyakini mampu memperkuat hubungan kemitraan antara KPPN dan seluruh stakeholder.

Hasil diskusi juga menunjukkan pentingnya penguatan sinergi antarinstansi dalam mendukung keberhasilan penyaluran Transfer ke Daerah. Beberapa peserta mengusulkan agar KPPN Mataram memperluas kerja sama dengan media massa, lembaga pendidikan, organisasi profesi, serta sektor perbankan untuk meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kebijakan penyaluran TKD. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi kepada pemerintah daerah sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan negara. Konsep kolaborasi antarorganisasi seperti ini merupakan salah satu karakteristik *collaborative governance* yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Ansell & Gash, 2008).

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan utama dalam penyaluran Transfer ke Daerah tidak hanya berasal dari aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sistem

informasi, koordinasi antarinstansi, serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik menjadi langkah strategis untuk membangun komunikasi dua arah antara KPPN Mataram dengan stakeholder sehingga setiap permasalahan dapat diidentifikasi lebih dini dan diselesaikan melalui rekomendasi perbaikan yang bersifat kolaboratif. Dengan demikian, kualitas pelayanan penyaluran Transfer ke Daerah diharapkan semakin meningkat dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Penyaluran Transfer ke Daerah

Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan KPPN Mataram tidak hanya berfungsi sebagai media sosialisasi kebijakan, tetapi juga menghasilkan berbagai rekomendasi yang dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Rekomendasi tersebut merupakan hasil diskusi bersama antara KPPN Mataram dengan pemerintah daerah, satuan kerja, organisasi profesi, lembaga perbankan, media massa, serta stakeholder lainnya. Melalui pendekatan partisipatif tersebut, berbagai permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sekaligus dirumuskan alternatif penyelesaiannya secara kolaboratif. Menurut Kementerian PANRB (2023), Forum Konsultasi Publik merupakan instrumen evaluasi pelayanan yang bertujuan memperoleh masukan dari masyarakat sebagai dasar penyempurnaan standar pelayanan publik.

Salah satu rekomendasi utama yang dihasilkan adalah perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya terkait penyusunan dan penerbitan regulasi teknis penyaluran Transfer ke Daerah. Peserta forum mengharapkan agar petunjuk teknis maupun perubahan kebijakan dapat diterbitkan lebih awal sehingga pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan dokumen persyaratan, menyusun perencanaan kas, dan melaksanakan proses penyaluran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepastian regulasi dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan penyaluran dana serta meminimalkan keterlambatan administrasi.

Rekomendasi berikutnya berkaitan dengan penguatan sistem informasi yang digunakan dalam penyaluran TKD. Beberapa peserta menyampaikan perlunya peningkatan integrasi antar aplikasi yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar proses penyampaian dokumen, validasi data, hingga pelaporan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Digitalisasi pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi, tetapi juga memerlukan interoperabilitas sistem sehingga mampu mengurangi duplikasi pekerjaan, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat proses pelayanan kepada pengguna layanan (OECD, 2020).

Selain aspek teknologi, forum juga merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berkala. Peserta mengusulkan agar KPPN Mataram lebih aktif menyelenggarakan forum edukasi mengenai perubahan regulasi, mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah, serta penggunaan aplikasi pendukung sehingga pemerintah daerah mampu menyesuaikan diri terhadap setiap perkembangan kebijakan. Pendampingan yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi aparatur sekaligus mengurangi potensi kesalahan administratif dalam proses penyaluran dana.

Forum juga menegaskan pentingnya penguatan fungsi KPPN sebagai *Financial Advisor* bagi pemerintah daerah. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pelaksanaan fungsi pencairan dana, tetapi juga mencakup pemberian konsultasi, asistensi, serta pembinaan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan menjalankan fungsi tersebut secara optimal, KPPN dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, mempercepat penyelesaian berbagai kendala penyaluran, serta

mendukung terciptanya pengelolaan APBN dan APBD yang lebih efektif dan akuntabel. Beberapa peserta bahkan mengapresiasi pelayanan KPPN Mataram yang dinilai responsif terhadap kebutuhan stakeholder dan berharap fungsi konsultatif tersebut terus ditingkatkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Rekomendasi lainnya adalah memperluas sinergi dengan media massa, lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan sektor perbankan dalam mendukung penyebaran informasi mengenai kebijakan Transfer ke Daerah. Kolaborasi lintas sektor dinilai mampu meningkatkan jangkauan sosialisasi, memperkuat transparansi informasi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Ansell & Gash, 2008).

Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik, dapat disimpulkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian permasalahan jangka pendek, tetapi juga menjadi strategi peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan efektivitas penyaluran Transfer ke Daerah, mempercepat proses administrasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.



KESIMPULAN

Kegiatan Diseminasi Pelayanan Penyaluran Transfer ke Daerah melalui Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh KPPN Mataram berhasil menjadi sarana komunikasi yang efektif antara penyelenggara layanan dengan para pemangku kepentingan. Melalui penyampaian materi, diskusi, dan konsultasi, kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan, regulasi, serta mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah, mulai dari pemenuhan persyaratan penyaluran, proses

verifikasi, penerbitan SPP, SPM, dan SP2D, hingga mekanisme penyelesaian retur, pembatalan SP2D, serta pemantauan dan evaluasi penyaluran dana. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung ketepatan administrasi, mempercepat proses penyaluran, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Forum Konsultasi Publik juga berhasil mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran Transfer ke Daerah, antara lain keterlambatan penerbitan petunjuk teknis, kendala penggunaan aplikasi OM-SPAN TKD, belum optimalnya integrasi sistem informasi, serta perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai permasalahan tersebut menghasilkan rekomendasi perbaikan berupa peningkatan koordinasi lintas instansi, penyempurnaan sistem informasi, optimalisasi fungsi KPPN sebagai *Financial Advisor*, peningkatan intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai stakeholder.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang penyaluran Transfer ke Daerah. Forum Konsultasi Publik terbukti menjadi media partisipatif yang mampu menghimpun aspirasi pengguna layanan sekaligus menjadi dasar bagi KPPN Mataram untuk melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan sehingga tercipta tata kelola penyaluran Transfer ke Daerah yang semakin efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chris Ansell, C., & Alison Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- John W. Creswell, J. W., & J. David Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Transfer ke Daerah*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Malcolm S. Knowles, M. S., Elwood F. Holton III, E. F., & Richard A. Swanson, R. A. (2020). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (9th ed.). Routledge.
- Matthew B. Miles, M. B., A. Michael Huberman, A. M., & Johnny Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Innovative citizen participation and new democratic institutions: Catching the deliberative wave*. OECD Publishing.
- Stephen P. Osborne, S. P. (2021). *Public service logic: Creating value for public service users, citizens, and society*. Routledge.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.